



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 09/Siaran Pers/AL/LI.04.01/02/2018

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 6 Februari 2018

KY Usulkan Empat Calon Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial ke DPR

Jakarta (Komisi Yudisial) – Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan empat nama calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Selasa (6/2) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta.

Berdasarkan Rapat Pleno KY pada Senin (22/01), KY menetapkan empat calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA yang diserahkan ke DPR adalah:

1. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H., (APINDO)
2. Erwin, S.H., M.H, (APINDO)
3. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si (Serikat Pekerja/Serikat Buruh)
4. Yoesoef Moesthafa, S.E., S.H., M.H. (Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi. Para calon yang diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan tersebut telah menjalani serangkaian tahapan, yaitu seleksi administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara terbuka.

Namun, empat calon yang diusulkan KY ke DPR tersebut tidak memenuhi jumlah yang diminta MA, yaitu delapan calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA. Hal tersebut dilakukan KY untuk menjaga kualitas para calon yang diusulkan ke DPR. Hanya calon yang layak secara kualitas dan integritas yang diusulkan.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, KY berupaya membekali para calon yang diusulkan agar mempunyai kesiapan diri saat menjalani *fit and proper test* di DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, KY akan memberikan penjelasan dan presentasi yang komprehensif kepada DPR RI agar diperoleh informasi tentang kapabilitas dan integritas masing-masing calon secara jelas. Bagian terpenting adalah optimalisasi komunikasi yang lebih intensif dengan Komisi III DPR RI sebagai mitra KY. Kebijakan ini sebagai upaya KY RI dalam menjalankan amanat undang-undang untuk menghasilkan hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di MA yang berkualitas dan berintegritas dalam mewujudkan peradilan yang agung dan bersih.

Juru Bicara KY RI

Farid Wajdi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY RI

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id